

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan di 20 OPD Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 19 Dinas dan 1 Badan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah yang menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan dan telah menjabat pada bagian tersebut minimal 1 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dan mengambil kembali kuesioner sesuai kesepakatan dengan masing-masing OPD. Penyebaran dan pengembalian kuesioner dilaksanakan dari tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2018. Adapun tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan kepada responden	103	100%
Kuesioner yang tidak kembali	11	10.7%
Kuesioner yang kembali	92	89.3%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	10	9.7%
Kuesioner yang dapat diolah	82	79.6%

Sumber: Data diolah, 2018

1. Demografi Responden

Responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan, dan lama bekerja di posisi saat ini. Adapun hasil dari klasifikasi responden adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	42	51,2%
2.	Perempuan	40	48,8%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 42 responden atau 51,2% dari total responden, sedangkan responden perempuan berjumlah 40 responden atau 48,8% dari total responden.

b. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Hasil klasifikasi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	21 - 35 tahun	9	11%
2.	36 - 50 tahun	54	65,9%
3.	> 50 tahun	19	23,2%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki umur antara 21-35 tahun sebanyak 9 responden atau 11%, responden yang memiliki umur antara 36-50 tahun sebanyak 54 responden atau 65,9% dan responden yang memiliki umur >50 tahun sebanyak 19 responden atau 23,2%.

c. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Hasil klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/K	26	31,7%
2.	D3	11	13,4%
3.	S1	35	42,7%
4.	S2	10	12,2%
5.	S3	0	0%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/K adalah sebanyak 26 responden atau 31,7%, responden yang memiliki pendidikan terakhir D3 sebanyak 11 responden atau 13,4%, responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 35 responden atau 42,7%, responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 10 responden atau 12,2%, dan responden yang memiliki pendidikan terakhir S3 sebanyak 0 responden.

d. Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Hasil klasifikasi responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Akuntansi	9	11,0%
2.	Manajemen	6	7,3%
3.	MIPA	3	3,7%
4.	Hukum	2	2,4%
5.	Lainnya	62	75,6%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi adalah sebanyak 9 responden atau 11%, responden yang memiliki latar belakang

pendidikan Manajemen sebanyak 6 responden atau 7,3%, responden yang memiliki latar belakang pendidikan MIPA sebanyak 3 responden atau 3,7%, responden yang memiliki latar belakang pendidikan Hukum sebanyak 2 responden atau 2,4%, dan responden yang memiliki latar belakang pendidikan selain yang disebutkan diatas adalah sebanyak 62 responden atau 75,6%.

e. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kasubag keuangan	17	20,7%
2.	Staf bagian keuangan	65	79,3%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan adalah sebanyak 17 responden atau 20,7%, sedangkan responden yang menjabat sebagai Staf Bagian Keuangan adalah sebanyak 65 responden atau 79,3%.

f. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Posisi Saat Ini

Hasil klasifikasi responden berdasarkan lama bekerja di posisi saat ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Posisi Saat Ini

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	<1 tahun	0	0%
2.	1 sd 5 tahun	32	39%
3.	6 sd 10 tahun	23	28,1%
4.	>10 tahun	27	32,9%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja di posisi saat ini selama < 1 tahun adalah 0 responden, responden yang bekerja di posisi saat ini antara 1-5 tahun sebanyak 32 responden atau 39%, responden yang bekerja di posisi saat ini antara 6-10 tahun sebanyak 23 responden atau 28,1% dan responden yang telah bekerja di posisi saat ini > 10 tahun sebanyak 27 responden atau 32,9%.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila apabila $KMO > 0,5$ dan nilai *loading factor* $> 0,4$. Hasil uji validitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah

Butir Pertanyaan	Nilai KMO	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
KAP1	0,675	0,642	Valid
KAP2		0,645	Valid
KAP3		0,421	Valid
KAP4		0,510	Valid
KAP5		0,637	Valid
KAP6		0,516	Valid
KAP7		0,630	Valid
KAP8		0,558	Valid
KAP9		0,485	Valid
KAP10		0,478	Valid
KAP11		0,443	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel independen kompetensi aparatur pemerintah memiliki nilai $KMO > 0,5$ yaitu sebesar 0,675, sehingga dapat dikatakan valid. Seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *loading factor* $> 0,4$ sehingga 11 butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Butir Pertanyaan	Nilai KMO	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
KPP1	0,773	0,611	Valid
KPP2		0,507	Valid
KPP3		0,911	Valid
KPP4		0,916	Valid
KPP5		0,891	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel independen ketaatan pada peraturan perundangan memiliki nilai KMO $> 0,5$ yaitu sebesar 0,773, sehingga dapat dikatakan valid. Seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *loading factor* $> 0,4$ sehingga lima butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi

Butir Pertanyaan	Nilai KMO	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
PA1	0,593	0,664	Valid
PA2		0,520	Valid
PA3		0,582	Valid
PA4		0,771	Valid
PA5		0,663	Valid
PA6		0,653	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel independen pengendalian akuntansi memiliki nilai KMO $> 0,5$ yaitu sebesar 0,593, sehingga dapat dikatakan valid. Seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *loading factor* $> 0,4$ sehingga enam butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Butir Pertanyaan	Nilai KMO	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
AKIP1	0,740	0,541	Valid
AKIP2		0,622	Valid
AKIP3		0,762	Valid
AKIP4		0,686	Valid
AKIP5		0,530	Valid
AKIP6		0,574	Valid
AKIP7		0,663	Valid
AKIP8		0,565	Valid
AKIP9		0,606	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai KMO $> 0,5$ yaitu sebesar 0,740, sehingga dapat dikatakan valid. Seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *loading factor* $> 0,4$ sehingga sembilan butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menentukan apakah kuesioner dapat digunakan dalam beberapa kali pengukuran dan menghasilkan data yang sama atau stabil. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Kompetensi Aparatur Pemerintah	0,744	11	Reliabel
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0,810	5	Reliabel
Pengendalian Akuntansi	0,707	6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,788	9	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0,744, nilai *Cronbach's Alpha* variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,810, nilai *Cronbach's Alpha* variabel pengendalian akuntansi pemerintah sebesar 0,707, dan nilai *Cronbach's Alpha* variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,788. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau handal.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah nilai residual data memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > *alpha* 0,05, maka data memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32124005
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.841
Asymp. Sig. (2-tailed)		.479

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,479 lebih besar daripada nilai *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Apabila nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* < 10 atau nilai

tolerance > 0,10 maka data tidak terkena multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.029	3.361		4.175	.000		
	KAP	-.016	.074	-.020	-.217	.829	.802	1.248
	KPP	.629	.115	.490	5.490	.000	.843	1.186
	PA	.454	.120	.353	3.778	.000	.771	1.296

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah (KAP) memiliki nilai VIF 1,248 < 10 dan nilai *tolerance* 0,802 > 0,10; variabel ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) memiliki nilai VIF 1,186 < 10 dan nilai *tolerance* 0,843 > 0,10; variabel pengendalian akuntansi PA memiliki nilai VIF 1,296 < 10 dan nilai *tolerance* 0,771 > 0,10. Setiap variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Data yang baik memiliki sifat homogen. Uji heterostedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai $\text{Sig} > \alpha$, maka data tidak terkena heteroskedastisitas atau data bersifat homogen. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.463	1.991		-.233	.817
	KAP	-.028	.044	-.079	-.638	.525
	KPP	.111	.068	.197	1.643	.104
	PA	.052	.071	.092	.731	.467

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig variabel kompetensi aparatur pemerintah (KAP) adalah $0,525 > 0,05$, variabel ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) adalah $0,104 > 0,05$, dan variabel pengendalian akuntansi (PA) adalah $0,467 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil uji regresi linear berganda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.029	3.361		4.175	.000		
	KAP	-.016	.074	-.020	-.217	.829	.802	1.248
	KPP	.629	.115	.490	5.490	.000	.843	1.186
	PA	.454	.120	.353	3.778	.000	.771	1.296

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{AKIP = 14,029 - 0,016 KAP + 0,629 KPP* + 0,454 PA* + e}$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai *constant* sebesar 14,029. Jika variabel kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi dianggap bernilai nol (0) atau konstan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 14,029 satuan. Koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah sebesar -0,016, artinya setiap penurunan kompetensi aparatur pemerintah sebesar satu satuan maka akan

mempengaruhi penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan asumsi variabel yang lain konstan. Koefisien regresi ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,629, artinya setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan asumsi variabel yang lain konstan. Koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar 0,454, artinya setiap peningkatan pengendalian akuntansi sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan asumsi variabel yang lain konstan.

1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KAP	82	16	36	52	43,17	3,956
KPP	82	10	15	25	20,59	2,499
PA	82	12	18	30	23,28	2,491
AKIP	82	16	29	45	36,84	3,207
Valid N (listwise)	82					

Sumber: Data diolah, 2018

Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran yang lengkap mengenai data dalam penelitian ini. Gambaran data tersebut meliputi rata-rata (*mean*), *sum*, *range*, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai

minimum. Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah (KAP) memiliki sampel sebanyak 82 responden. Nilai maksimum jawaban responden pada variabel ini adalah 52 dan nilai minimum sebesar 36, sehingga variabel ini memiliki *range* 16. Rata-rata (*mean*) total jawaban responden sebesar 43,17 dan standar deviasi sebesar 3,956.

Variabel ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) memiliki sampel sebanyak 82 responden. Nilai maksimum jawaban responden pada variabel ini adalah 25 dan nilai minimum sebesar 15, sehingga variabel ini memiliki *range* 10. Rata-rata (*mean*) total jawaban responden sebesar 20,59 dan standar deviasi sebesar 2,499.

Variabel pengendalian akuntansi (PA) memiliki sampel sebanyak 82 responden. Nilai maksimum jawaban responden pada variabel ini adalah 30 dan nilai minimum sebesar 18, sehingga variabel ini memiliki *range* 12. Rata-rata (*mean*) total jawaban responden sebesar 23,28 dan standar deviasi sebesar 2,491.

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) memiliki sampel sebanyak 82 responden. Nilai maksimum jawaban responden pada variabel ini adalah 45 dan nilai minimum sebesar 29, sehingga variabel ini memiliki *range* 16. Rata-rata (*mean*) total jawaban responden sebesar 36,84 dan standar deviasi sebesar 3,207.

Tabel 4.18
Rincian Jawaban Variabel Dependen

No	Pertanyaan	STS & TS		Netral		S & SS		Mean
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Di OPD saya telah ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	0	0%	8	9,8%	74	90,2%	4,15
2.	Di OPD saya visi dan misi program telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi	0	0%	5	6,1%	77	93,9%	4,15
3.	OPD saya telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program.	0	0%	3	3,7%	79	96,3%	4,17
4.	OPD saya telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.	1	1,2%	8	9,8%	73	89%	4,05

No	Pertanyaan	STS & TS		Netral		S & SS		Mean
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
5.	OPD saya telah membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.	0	0%	8	9,8%	74	90,2%	4,17
6.	OPD saya telah melakukan pengecekan terhadap jalannya program.	1	1,2%	11	13,4%	70	85,4%	4,06
7.	Pelaksanaan kegiatan di OPD saya telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.	1	1,2%	4	4,9%	77	93,9%	4,22
8.	Di OPD saya kegiatan/program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.	5	6,1%	27	32,9%	50	61%	3,67

No	Pertanyaan	STS & TS		Netral		S & SS		Mean
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
9.	Di OPD saya LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.	0	0%	5	6,1%	77	93,9%	4,21

Sumber: Data diolah, 2018

Menurut tabel 4.18 diatas, item pertanyaan pertama variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 74 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 90,2%. Kemudian sebanyak 8 responden memilih jawaban netral atau 9,8%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden. Mean dari item pertanyaan pertama adalah sebesar 4,15. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah menjalankan kinerja sesuai dengan program dan arah kebijakan yang ingin dituju yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila pencapaian kinerja yang dilakukan telah maksimal maka akan berdampak pada tingginya tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada item pertanyaan kedua variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 77 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju

dan sangat setuju atau sebesar 93,9%. Kemudian sebanyak 5 responden memilih jawaban netral atau 6,1%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden. Mean dari item pertanyaan kedua adalah sebesar 4,15. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa visi dan misi program di OPD mereka telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. Visi dan misi program atau kegiatan harus sesuai dengan rencana strategik karena rencana strategik organisasi merupakan arah organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau program.

Pada item pertanyaan ketiga variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 79 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 96,3%. Kemudian sebanyak 3 responden memilih jawaban netral atau 3,7%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden. Mean dari item pertanyaan ketiga adalah sebesar 4,17. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program. Indikator kinerja merupakan pengukur tingkat keberhasilan OPD dalam menjalankan program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan.

Pada item pertanyaan keempat variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 73 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju

dan sangat setuju atau sebesar 89%. Kemudian sebanyak 8 responden memilih jawaban netral atau 9,8%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,2%. Mean dari item pertanyaan keempat adalah sebesar 4,05. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah melakukan analisis keuangan terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya analisis keuangan terhadap program yang telah dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Kulon Progo akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tinggi.

Pada item pertanyaan kelima variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 74 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 90,2%. Kemudian sebanyak 8 responden memilih jawaban netral atau 9,8%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden. Mean dari item pertanyaan kelima adalah sebesar 4,17. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab OPD atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, baik itu informasi mengenai keberhasilan kegiatan maupun ketidak berhasilan kegiatan.

Pada item pertanyaan keenam variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 70 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 85,4%. Kemudian sebanyak 11 responden memilih jawaban netral atau 13,4%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,2%. Mean dari item pertanyaan keenam adalah sebesar 4,06. Pada item pertanyaan ketujuh variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 77 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 93,9%. Kemudian sebanyak 4 responden memilih jawaban netral atau 4,9%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,2%. Mean dari item pertanyaan ketujuh adalah sebesar 4,22. Item pertanyaan keenam dan ketujuh saling berkaitan karena pengecekan program dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program tersebut dilaksanakan, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Pada item pertanyaan kedelapan variabel dependen menunjukkan hasil bahwa 50 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 61%. Kemudian sebanyak 27 responden memilih jawaban netral atau 31,9%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 6,1%. Mean dari item pertanyaan kedelapan adalah sebesar 3,67. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian responden setuju dan sangat setuju

bahwa OPD mereka telah menyusun program atau kegiatan yang mengakomodir tuntutan atau perubahan di masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan OPD kepada masyarakat.

Pada item pertanyaan kesembilan variabel dependen menunjukkan hasil bahwa dari 77 dari 82 responden yang mengisi kuesioner memilih jawaban setuju dan sangat setuju atau sebesar 93,9%. Kemudian sebanyak 5 responden memilih jawaban netral atau 6,1%. Sedangkan responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden. Mean dari item pertanyaan kedelapan adalah sebesar 4,21. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian responden setuju dan sangat setuju bahwa OPD mereka telah menggunakan LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program atau kegiatan selanjutnya. Dengan menggunakan LAKIP, suatu OPD dapat menentukan program mana yang akan dilanjutkan dan program mana yang akan diperbaiki karena dalam LAKIP dapat dilihat tingkat keberhasilan suatu program.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen yaitu kompetensi aparatur pemerintah (KAP), ketaatan pada peraturan perundangan (KPP), dan pengendalian akuntansi (PA) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Nilai koefisien determinasi (*adjusted R*

square) adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai *adjusted R square* yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.456	2.365

a. Predictors: (Constant), PA, KPP, KAP

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,456. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu yaitu kompetensi aparatur pemerintah (KAP), ketaatan pada peraturan perundangan (KPP), dan pengendalian akuntansi (PA) dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebesar 45,6 %, sisanya sebesar 54,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama apabila $\text{sig} < \alpha$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	396.498	3	132.166	23.621	.000 ^a
	Residual	436.441	78	5.595		
	Total	832.939	81			

a. Predictors: (Constant), PA, KPP, KAP

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel diatas menunjukkan nilai F sebesar 23,621 dengan nilai sig 0,000 < α 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria hipotesis diterima apabila nilai sig < α 0,05 dan koefisien searah dengan arah hipotesis. Hasil uji T disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.029	3.361		4.175	.000		
	KAP	-.016	.074	-.020	-.217	.829	.802	1.248
	KPP	.629	.115	.490	5.490	.000	.843	1.186
	PA	.454	.120	.353	3.778	.000	.771	1.296

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel uji T diatas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel 4.20, variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,829 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar -0,016. Nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur pemerintah lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 1 (H_1) ditolak.

b. Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel 4.20, variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar 0,629. Nilai signifikansi variabel ketaatan pada peraturan perundangan lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05,

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 2 (H_2) diterima.

c. Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel 4.20, variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar 0,454. Nilai signifikansi variabel pengendalian akuntansi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hipotesis 3 (H_3) diterima.

D. Pembahasan (Interpretasi)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah (H_1) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan nilai sig $0,829 < \alpha$ 0,05. Hasil penelitian ini berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk. (2014), Putri dkk. (2015), dan Wardhana dkk. (2015), namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rofika dan Ardianto (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Manusia merupakan elemen penting yang membuat suatu organisasi mencapai keberhasilan. Manusia adalah satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lain bekerja dan berdampak langsung terhadap organisasi. Dalam melakukan suatu hal, manusia memiliki kompetensi yang berbeda-beda atau bahkan sama antara satu dengan yang lain. Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansi. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi akan menghasilkan informasi akuntabilitas kinerja yang tidak mengandung kesalahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Putri dkk., 2015).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini diduga disebabkan karena aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau paling tidak memiliki latar belakang sektor publik masih minim. Berdasarkan hasil jawaban responden atas kuesioner yang diberikan menunjukkan bahwa adanya aparatur pemerintah yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan jabatannya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik apabila kompetensi dari aparatur pemerintah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai bidangnya.

Mungkin kesesuaian antara tugas dengan kompetensi sulit dicapai karena adanya tuntutan untuk siap ditempatkan pada posisi apapun dan kesenjangan antara formasi dengan spesifikasi aparatur pemerintah yang sesuai dan (Sofyani dan Akbar, 2015). Namun, hal tersebut dapat ditutupi dengan pelatihan, pengalaman yang cukup dan non akademik (seperti: kemampuan memimpin, kemampuan menyesuaikan diri, d.l.l). Selain itu, penggunaan sistem informasi dirasa mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kabupaten Kulon Progo telah menggunakan sistem informasi kinerja yang meliputi RencanaKu, SakipKu dan MonevKu. Rencanaku dapat digunakan untuk membantu sinkronisasi proses perencanaan, serta sistem informasi Sakipku dan MonevKu dapat digunakan untuk membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh OPD.

2. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan (H_2) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk. (2014), Wahid dkk. (2016), dan Pratolo dkk. (2016) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem hukum yang dianut dalam akuntansi sektor publik adalah sistem civil law dimana setiap kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah didasarkan atas peraturan perundangan. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pada OPD Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai panduan instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan, program, dan kebijakan untuk melayani masyarakat sehingga capaian kinerja akan lebih baik. Dalam

pelaksanaannya, akuntabilitas harus didukung oleh peraturan perundangan seperti perbaikan laporan akuntabilitas, penerapan sistem *reward and punishment*, d.l.l. Instansi pemerintah yang taat pada peraturan perundangan akan menghasilkan laporan akuntabilitas yang tepat dan sesuai, sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan informasi publik. Selain itu Semakin taat suatu instansi pemerintah terhadap peraturan perundangan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel pengendalian akuntansi (H_3) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2012), Cahyani dan Utama (2015), dan Setyawan dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi meningkat karena

pengendalian akuntansi akan mendorong para manajer subunit di OPD dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan secara lebih baik. Pengendalian akuntansi juga diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur instansi pemerintah dalam rangka menjaga kekayaan dan reliabilitas data keuangan. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dalam suatu instansi memungkinkan pemerintah dalam membuat keputusan dan mengontrol operasi dengan baik, memperkirakan biaya serta memilih alternatif terbaik sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Semakin baik penggunaan pengendalian akuntansi di OPD, maka pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.